

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA  
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Profil Dinas	a. Informasi tentang kedudukan/ domisili/ alamat lengkap b. Struktur Organisasi c. Tugas Pokok dan Fungsi d. Jumlah PNS berdasarkan Struktural, Fungsional, kepegangatan e. Jenis Layanan f. PMKS dan PSKS g. Program dan kegiatan	Sekretariat	Sekretaris	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Program dan Kegiatan	Program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan a. Nama program dan kegiatan b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Sekretaris	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
3.	LAKIP	Ringkasan informasi tentang kinerja tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat	Sekretaris	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
4.	Laporan Keuangan Audited	Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas : a. Neraca dan LRA b. Neraca c. Laporan Arus Kas dan CALK d. Daftar Aset dan Inventaris	Sekretariat	Sekretaris	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkait	Sekretariat	Sekretaris	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	1 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan n atau Retensi Arsip
6.	Data Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Jumlah data PPKS di Kota Palangka Raya	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam Online File,	Selama Berlaku
7.	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya	a. Jumlah data PSKS di Kota Palangka Raya b. Data Legalitas Lembaga Kesejahteraan Sosial c. Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang yang telah dikeluarkan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial,	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam Online File,	Selama Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DUMUMKAN SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
-	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi
1.	Prosedur Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Prosedur dan syarat untuk mendapatkan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Prosedur Layanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya	a. Prosedur dan syarat Permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial b. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial c. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang d. Pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan PSKS	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku

Palangka Raya, 23 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes  
Pembina  
NIP 197112061994031006



DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
 TAHUN 2024

No	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
3	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif
4	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012	a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial b. Kepentingan untuk penanganan rehabilitasi sosial c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif



		tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	dengan bermaterai		
5	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terlindungi kerahasiaannya
6	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)

Palangka Raya, 23 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes  
Pembina  
NIP 197112061994031006

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA  
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja mengasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penyediaan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Profil Dinas	a. Informasi tentang kedudukan/ domisili/ alamat lengkap b. Struktur Organisasi c. Tugas Pokok dan Fungsi d. Jumlah PNS berdasarkan Struktural,Fungsional, kepegangkatan e. Jenis Layanan f. PMKS dan PSKS g. Program dan kegiatan	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Program dan Kegiatan	Program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan a. Nama program dan kegiatan b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
3.	LAKIP	Ringkasan informasi tentang kinerja tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
4.	Laporan Keuangan Audited	Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas : a. Neraca dan LRA b. Neraca c. Laporan Arus Kas dan CALK d. Daftar Aset dan Inventaris	Sekretariat	Subbag Keuangan dan Aset	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	Sekretariat	Subbag Keuangan dan Aset	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	1 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi
6.	Data Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Jumlah data PPKS di Kota Palangka Raya	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
7.	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya	a. Jumlah data PSKS di Kota Palangka Raya b. Data Legalitas Lembaga Kesejahteraan Sosial c. Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang yang telah dikeluarkan	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi
-	-	-	-	-	-	-	-



C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja mengusai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penybitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Prosedur Layanan Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Prosedur dan syarat untuk mendapatkan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Prosedur Layanan Surtber Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	a. Prosedur dan syarat Permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial b. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang yang telah dikeluarkan c. Pembinaan pemberdayaan PSKS dan	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL, KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024

No	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Aktibet bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
3	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	perminitaan khnusus (penelitian, penegakan hukum)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif
4	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	a. Kepentingan untuk penyelaluran bantuan sosial b. Kepentingan untuk penanganan rehabilitasi sosial c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bernmaterai	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif

5	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terlindungi kerahasiannya
6	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)

Palangka Raya, \${tanggal\_naskah}

Kepala Dinas,  
\${ttid\_pengirim}  
\${nama\_pengirim}  
Pembina  
\${nip\_pengirim}